

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi Jakarta. 2007.
- Ali, Chidir., *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. III., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly., Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*, Press, Jakarta, 2012.
- Asyadie, Zaeni., *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Azikin, Zainal., *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang Di Indonesia*, PT. Radj Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- B. Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk.Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.
- Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta Jakarta, 1983.
- Hendrojogi, Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Hutabarat, Samuel MP. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Grasindo, 2010.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Ctk.Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- K. Santoso, *Akibat Hukum Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998.

- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Lawrence M. Friedman, 2018, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2018
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik ( Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga)*, Ctk.Kedua, PT.Alumni, Bandung, 2013
- Man.S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)]*, Ctk.Kesatu, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari'ah*, sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munkner, Hans., *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Reka Desa, Jakarta, 2011.
- Rahardja Hadhikusuma, R.T. Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rochmawanto, Munif, *Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Independent, Lampung, 2015.
- Salim HS, et.al. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Santiago, Faisal., *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Sembiring, Sentosa., *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Simaputang, Richard Burton., *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, 2003.
- Sinaga, Syamsudin M., *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Sitio, Arifin. *koperasi: Teori dan Praktek*. Erlangga, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001

- Sjahdeini, Sutan Remy., *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sri Soesilowati Mahdi, et al, *Hukum Perdata suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, PT Sofmedia, Medan, 2010.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Vorkink-van Hoeve, Bandung, 1959.
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

## B. Jurnal

- Afrita, Indra dan Yalid, “Asas Kekeluargaan Sebagai Nilai Konstitusional dalam Koperasi dan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Respublica* 13, Nomor 2, 2014.
- Damlah, Judita., “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Lex Crimen*, Volume. 6, Nomor 2, 2017.
- Fibriani, Riza, “Tinjauan Hukum Kepailitan Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ius Constituendum* 7, Nomor 1, 2022, hlm. 88.
- Febri Yanti Casanova, dkk, “Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Pactum Law Jurnal*, Vol.1, No.2, 2018, hlm. 23-50.
- Ginting, Jamin. “Pengertian Utang Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Yurisprudensi”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 11, No. 1, Juli 2002.
- Harsono, I., & Prananingtyas, P., “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer”. *Notarius*, Vol.12, No.2, 2019, hlm. 1067-1088.
- Prihandani, N. M. I., dkk, “Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan”, *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol.3, No.1, 2018, hlm. 141-178.
- Rahmadiyah, Rindy Ayu. “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Notarius*, Volume. 8. Nomor 2, 2015.

- Nadia Maulisa, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi Yang Diajukan Oleh Anggotanya”, *Jurnal Legal Reasoning*, Volume. 4. Nomor. 1, 2021
- Nurindra, Nindya Raras Wisesa. “Tanggung Jawab Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam”. Diss. Unika Soegijapranata Semarang, 2019.
- Prayogo, Sedyo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3 No. 2, 2016
- Ramadhani, Dwi Aryanti. “Wanprestasi dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Yuridis* Volume.15, No.17, 2012
- Rihwanto, Yacob. “Kedudukan Debitur Pasca Penetapan PKPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)”, Diss. Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Sarwoko, Endi. "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang", *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Volume 5, Nomor 3 ,2009, hlm 172-188.
- Taufiqurrochman, Cecep. “Seluk Beluk tentang Konsep Bunga Kredit Bank”, *Jurnal Kebangsaan* Volume 2, Nomor 3, 2013.

### C. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.